

Analisis Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah

Analysis of Determinants of Economic Growth in Central Kalimantan Province

Faisal Asrawi¹, Andrie Elia², Miar³

¹Student of the Master of Economics in Palangka Raya University

^{2&3}Department of Economics, Economics and Business Faculty, University of Palangka Raya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi berupa penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder time series tahun 1995-2014. Selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, penanaman modal asing (PMA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, ekspor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kata kunci : *pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor*

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of capital expenditure on economic growth in Central Kalimantan Province, to find out and analyze the effect of investment in the form of domestic investment (PMDN) on economic growth in Central Kalimantan Province, to find out and analyze the effect of investment in foreign investment (PMA) on economic growth in Central Kalimantan Province, to find out and analyze the influence of exports on economic growth in Central Kalimantan Province. The research method used is descriptive quantitative with time series secondary data 1995-2014. Then the data will be analyzed using multiple linear analysis. The results showed that capital expenditure has a positive and significant effect on economic growth in Central Kalimantan Province, domestic investment (PMDN) has a positive and significant effect on economic growth in Central Kalimantan Province, foreign investment (PMA) has a negative and not significant effect on growth economy in Central Kalimantan Province, exports have a negative and not significant effect on economic growth in Central Kalimantan Province.

Keyword: *economic growth, domestic investment, foreign investment, exports*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi masih merupakan tujuan utama dan indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berkurangnya kemiskinan (Pradipta dkk, 2016).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Sukirno (1996), Boediono (1999), dan Jhingan (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator terhadap keberhasilan pembangunan suatu wilayah.

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dimana pertumbuhan ekonomi diharap mampu meningkatkan faktor-faktor produksi yang bertujuan merangsang perkembangan ekonomi dalam skala besar.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang

dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode merupakan akumulasi dari seluruh produksi dalam suatu perekonomian negara yang disebut Produk Domestik Bruto (PDB) tingkat Nasional dan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) di tingkat Regional/wilayah. PDB dan PRDB digunakan untuk mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu.

Peranan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat diukur dengan melihat output yang dihasilkan atau yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selanjutnya data dari produk domestik regional bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan sebagai indikator dalam pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu periode tertentu.

Konsep dasar PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit dalam daerah tertentu. Sehingga dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, diperlukan tahun dasar sebagai acuan perhitungan PDRB untuk dapat membandingkan perkembangan pertumbuhan dari tahun ke tahun yang biasa

disebut sebagai PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

PDRB Atas Harga Konstan Tahunan 2000 Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan yang positif setiap tahunnya, dimana pada tahun 1995 PDRB Kalteng adalah sebesar Rp. 3.815.396.000 meningkat menjadi sebesar Rp. 83.909.500.000 pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan bersifat stabil dari tahun ketahun pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya dengan perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi yang negatif akan berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah selama priode 1995-2016 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, seperti ditunjukkan pada tahun 1995 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah sebesar 3,38% menurun pada tahun 1998 menjadi -6,92%. Hal ini dikarenakan secara nasional pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan akibat adanya krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mencapai angka 7,96% atau meningkat sebesar 0,59% dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 7,37%.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1995-2016 yang mengacu pada pertumbuhan PDRB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran dan kontribusi aspek pengeluaran pemerintah daerah, yang meliputi total belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah daerah yang proposional setiap tahunnya akan menjadi stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran Pemerintah adalah bagian dari kebijakkan fiskal berupa suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, sebagaimana tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan kebijakan fiskal dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun mendorong pertumbuhan ekonomi.

Merujuk dari apa yang telah dikemukakan, maka jika suatu daerah menginginkan pertumbuhan ekonominya tumbuh secara baik perlu didukung dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang memadai. Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan

berbagai faktor pendukung seperti investasi, sumberdaya alam yang tersedia, perdagangan luar negeri, stabilitas nasional, pengeluaran pemerintah yang tercantum pada APBD, serta sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian komprehensif yang berkaitan dengan masalah pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah yang dihubungkan dengan pengeluaran pemerintah (belanja modal), investasi, dan ekspor. Untuk itu penulis mengangkat judul “*Analisis Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah*”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari semakin kuatnya atau semakin tingginya pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik akan membawa dampak positif bagi perkembangan sektor-sektor perekonomian yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dan pembiayaan yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Suatu ekonomi dapat dikatakan memiliki kondisi ekonomi yang baik melalui perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau secara sederhana diukur dari peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang telah dihasilkan. Indikator jumlah produksi barang dan jasa dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan PDB berdasarkan harga konstan (PDB Riil) untuk mengeliminasi pengaruh perubahan harga selama periode waktu pengukuran.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan rata-rata dari output yang dihasilkan setiap orang dalam produksi barang dan jasa yang merupakan tingkat pertumbuhan perkapita secara riil bagi setiap orang. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai kenaikan GDP riil suatu negara pada tahun tertentu yang menunjukkan naiknya pendapatan perkapita setiap orang dalam perekonomian dan dalam suatu negara pada tahun tertentu.

Dalam konteks tertentu pertumbuhan perekonomian suatu wilayah mengacu pada perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti peningkatan jumlah produksi barang modal. Menurut Todaro (2003) terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) Akumulasi Modal meliputi semua bentuk atau jenis

investasi baru yang ditanam, peralatan fisik dan modal atau sumberdaya manusia; (2) Pertumbuhan penduduk yang pada beberapa tahun akan memperbanyak jumlah angkatan kerja; dan (3) Kemajuan dari sebuah teknologi. Dari ketiga faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber kemajuan ekonomi bisa meliputi berbagai macam faktor.

Seperti terlihat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dikatakan relative stabil pada kisaran 5% sejak 2004. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran pemerintah (belanja modal) yang cukup dominan sebesar 50% disamping belanja sektor swasta.

2.2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan.

Menurut teori ini, pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Jika jumlah penduduk terus bertambah, maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan memengaruhi fungsi produksi yaitu

produksi marginal akan mengalami penurunan dan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan Neo Klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi (Wahyuni, 2004). Model pertumbuhan Solow-Swan menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi memengaruhi tingkat output dan pertumbuhannya sepanjang waktu.

Selain itu Keynes menyatakan bahwa pendapatan total tergantung dari permintaan efektif dari permintaan konsumen serta permintaan investasi. Analisis lanjutan dari paham Neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi yang mantap diperlukan suatu tingkat saving yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali.

Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Harrod Domar (1948) mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi pertama kali pada tahun 1947 yang dimuat dalam jurnal *American Economic Review*.

Sementara jauh sebelumnya Harrod (1939) telah mengemukakan tentang teori pertumbuhan dan mempublikasikan tulisannya dalam *economic journal*.

Teori Harrod Domar adalah sebuah teori baru dan merupakan perluasan dan pengembangan dari analisis Keynes tentang masalah kerja. Hal ini dikembangkan untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan, agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.

Menurut Harrod Domar investasi memberikan peranan kunci dalam proses pertumbuhan yang disebabkan oleh investasi yang menciptakan pendapatan sebagai dampak dari penawaran. Investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan persediaan modal yang merupakan dampak dari penawaran.

Teori Schumpeter

Ekonomi Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Sebab para pengusaha yang mempunyai kemampuan dan keberanian mengaplikasikan penemuan-penemuan baru dalam aktivitas produksi.

2.3. Teori Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow menekankan pada lima tahap dalam pertumbuhan ekonomi. Analisis dari Rostow di dasarkan pada keyakinan bahwa

pertumbuhan ekonomi akan tercapai sebagai akibat timbulnya perubahan yang fundamental dalam corak kegiatan ekonomi. Hal ini juga membawa pengaruh bagi kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara.

Adapun lima tahap dalam teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow sebagai berikut.

1) Tahap Masyarakat Tradisional

Pada tahap masyarakat tradisional masyarakat masih menggunakan cara-cara produksi primitif dan dipengaruhi oleh nilai-nilai tak rasional serta adat istiadat. Tingkat produksi dan produktivitas sangat rendah.

2) Tahap Persyaratan Lepas Landas

Tahap ini merupakan transisi persiapan mencapai pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut.

3) Tahap Lepas Landas

Tahap lepas landas ditandai oleh perubahan drastis dan pesat. Tahap ini adalah terjadinya kenaikan investasi produktif dan terbentuknya kerangka dasar politik, sosial dan kelembagaan yang menjamin pertumbuhan yang cepat.

4) Tahap Gerak ke Arah Kedewasaan

Tahap ini merupakan tahap dimana teknologi canggih sudah digunakan secara efektif dalam proses produksi dan pengelolaan sumber-sumber daya alam. Tingginya keterampilan tenaga kerja

serta semakin dominannya sektor industri *manufacturing* yang menggantikan dan mendesak sektor pertanian dan sektor-sektor tradisional, berupa perubahan sistem manajemen dan pengolahan bisnis.

5) Tahap Konsumsi Tinggi

Tahap konsumsi tinggi merupakan tahap dimana masyarakat lebih menekankan pada konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan kemakmuran merupakan fokusnya.

2.4. Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tercermin dalam nilai PDB atau tingkat regional atau disebut PDRB. PDRB merupakan seluruh nilai tambah yang dihasilkan berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu negara atau agregat perubahan nilai PDRB akan menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu.

Adapun konsep perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode (Rahardja, 2001: 178) yaitu:

$$G_t = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

dimana:

G_t = Pertumbuhan Ekonomi priode t (tahun)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto t (harga konstan)

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto satu priode sebelumnya

Jika interval waktu lebih dari satu periode, maka perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan eksponensial:

$$PDRB_t = PDRB_0(1+r)^t$$

dimana:

$PDRB_t$ = PDRB priode t

$PDRB_0$ = PDRB priode 0

r = tingkat pertumbuhan

t = jarak priode

Untuk menghitung besarnya pendapatan nasional atau regional, maka ada tiga metode pendekatan yang dipakai, yaitu:

1) **Pendekatan Produksi.** Metode ini dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan sektor ekonomi produktif bagi wilayah suatu negara. Berikut secara matematis:

$$N_1 P_1 Q_1 + P_2 Q_2 + \dots + P_n Q_n$$

dimana:

N_1 = PDB

$P_1, P_2, \dots P_n$ = harga satuan produk pada sektor ekonomi

$Q_1, Q_2, \dots Q_n$ = jumlah produk pada satuan sektor ekonomi

2) **Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*).** Metode ini dihitung dengan jumlah besarnya total pendapatan atau balas jasa setiap faktor produksi. Berikut secara matematis:

$$Y = Y_w + Y_r + Y_i = Y_p$$

dimana:

Y = Pendapatan Nasional atau Regional (PDB/PDRB)

Y_w = Pendapatan Upah Gaji

Y_r = Pendapatan Sewa

Y_i = Penadapatan Bunga
 Y_p = Penadapatan Laba atau *profit*

G = Pengeluaran rumah tangga pemerintah
 $(X-M)$ = ekspor netto atau pengeluaran rumah tangga luar negeri.

3) Pendekatan Pengeluaran (*Consumption Approach*). Metode ini dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan berbagai golongan pembeli dalam masyarakat. Berikut secara matematis:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

dimana:

Y = Pendapatan Domestik Bruto/ Regional
 C = Pengeluaran rumah tangga konsumen untuk konsumsi
 I = Pengeluaran rumah tangga perusahaan untuk investasi

2.5. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membelinya. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiaannya.

Tabel 1
 Struktur Pengolahan Keuangan Daerah

| No. | PP No. 5&6 Tahun 1975 | No.105&108 Tahun2000 | Pemendagri No.13 Tahun 2006 |
|-----|---|---|--|
| 1. | Belanja Rutin <ul style="list-style-type: none"> • Belanja pegawai. • Belanja barang (pegawai, barang dan jasa, bunga). • Belanja pemeliharaan operasi dan pemeliharaan dinas. • Belanja lain-lain. • Angsuran pinjaman/utang dan bunga. • Belanja pensiun. Ganjaran/ Subsidi. • Pengeluaran tidak termasuk bagian lain. | Belanja Aparatur <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi umum (pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan) • Operasi dan pemeliharaan. • Belanja Modal | Belanja Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> • Belanja pegawai • Bunga • Subsidi • Hibah • Bantuan Sosial • Belanja Bagi Hasil • Bantuan Keuangan • Belanja tidak terduga |
| 2. | Belanja Pembangunan (Belanja Modal) | Belanja Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi umum. • Operasi dan pemeliharaan | Belanja Langsung <ul style="list-style-type: none"> • Belanja pegawai. • Belanja barang dan jasa. • Modal |
| 3. | - | Belanja Bagi Hasil dan Bantuan | - |

Belanja pada umumnya di sektor publik, tidak disekitar sektor bisnis. Belanja disektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja atau biaya berdasarkan hubungannya terdiri dari dua,

yaitu: biaya langsung dan biaya tidak langsung.

2.6. Investasi

Investasi sering mengarah pada perubahan keseluruhan permintaan dan memengaruhi sirkulus bisnis. Selain itu investasi mengarah kepada akumulasi modal yang bisa meningkatkan output

potensi negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing. Investasi adalah komponen utama dalam menggerakkan roda suatu negara.

2.7. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada pasal 1 menyatakan bahwa:

- 1) Undang-Undang ini dengan modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik dimiliki negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisikan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan pasal 2 UU No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.
- 2) Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut pada pasal 2 dinyatakan “ Penanaman Modal Dalam Negeri” ialah penggunaan dari pada

kekayaan seperti dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut ketentuan.

2.8. Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing digunakan untuk menjelaskan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

2.9. Ekspor

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor adalah total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantaranya barang-barang, asuransi, dan jasa pada suatu tahun tertentu.

Dengan demikian untuk mendukung perkembangan dan meningkatkan pertumbuhan ekspor Indonesia diperlukan kebijakan ekspor yang secara garis besar mampu mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.

2.10. Teori Perdagangan Internasional Teori Keunggulan Absolut

Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya *The Wealth of Nation* menyatakan bahwa perdagangan bebas sebagai suatu kebijakan

yang paling baik untuk negara-negara didunia.

Asumsi yang digunakan Adam Smith dalam analisisnya adalah (1) Berlaku teori nilai tenaga kerja bagi penentuan nilai suatu barang, (2) Hanya tenaga kerja yang merupakan faktor produksi bersifat homogen.

Keuntungan mutlak adalah sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam perhari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang.

Teori Keunggulan Komperatif

Teori keunggulan komperatif David Ricardo melakukan perbaikan atas teori absolut yang belum dapat menjawab permasalahan yaitu jika terdapat negara yang tidakmemiliki keunggulan absolut dapat melakukan perdagangan. Sehingga menurut Ricardo keunggulan dari masing-masing negara yang melakukan perdagangan dalam konsep bersifat relatif, tidak absolut, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith.

Ricardo berpendapat bahwa manfaat dari perdagangan masih ada meskipun negara tersebut mengalami kerugian secara mutlak. Keunggulan Komperatif, perdagangan masih dapat terjadi selama masing-masing negara mempunyai keunggulan komperatif dalam menghasilkan suatu macam komoditi.

Teori Heckscher-Ohlin (H-O)

Teori perdagangan internasional modern dimulai ekonom Swedia yaitu Eli Heckscher (1919) dan Bertil Ohlin (1933) yang mengemukakan bahwa penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan diteori keunggulan komperatif. Teori klasik comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam *productivity of labor* antar negara. Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas.

2.11. Hubungan Antara Belanja Modal, Investasi, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi **Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin.

Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengukur dan mengurus tiap-tiap daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi merupakan salah satu variabel terpenting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Karenanya pemerintah setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju terus berupaya meningkatkan investasi di negaranya. Investasi dapat bersumber dari dalam negeri maupun investasi luar negeri.

Hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk investasi berupa pembelian barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian. Hal ini dapat meningkatkan PDB riil Indonesia dan dengan demikian akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori makro, hubungan antara ekspor dengan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan suatu persamaan identitas, karena ekspor merupakan bagian dari tingkat pertumbuhan ekonomi.

Secara teoritis ekspor suatu barang dipengaruhi oleh suatu penawaran (*supply*) atau permintaan (*demand*). Dalam teori perdagangan internasional disebut bahwa faktor-faktor yang

memengaruhi ekspor dapat dilihat dari sisi permintaan, dimana ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, nilai tukar riil, pendapatan dunia, dan kebijakan devaluasi. Sedangkan dari sisi penawaran, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, harga domestik, nilai tukar riil, kapasitas produksi yang diproduksi melalui investasi, impor bahan baku, dan kebijakan deregulasi.

3. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang membutuhkan modal atau dana pembangunan baik yang berasal dari internal/domestik, maupun eksternal dengan mengundang pihak lain/luar untuk membiayai pembangunan tersebut. Besar kecilnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai, berkorelasi dengan besar kecilnya anggaran pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam pembangunan ekonomi. Korelasi antara alokasi anggaran pengeluaran dengan beberapa indikator ekonomi, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan.

Dalam kerangka pemikiran ini, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah digambarkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk menghasilkan PDRB ada beberapa indikator yang harus diukur seperti belanja modal, investasi yang terdiri dari

penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), serta ekspor.

3.2. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan penelitian mengenai hubungan antara variabel yang dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Adanya pengaruh yang signifikan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Adanya pengaruh yang signifikan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Adanya pengaruh yang signifikan penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah
- 4) Adanya pengaruh yang signifikan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

4. METODE PENELITIAN

4.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Belanja Modal, Investasi, Ekspor Kalimantan Tengah selama periode tahun 1995-2016, PDRB perkapita atas dasar harga konstan dan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 1995-2016.

4.2. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh berupa data keuangan, data investasi, PMA, nPMDN, data nilai ekspor, serta data pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah selama tahun 1995-2016. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen yang dipublikasikan oleh lembaga tertentu (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, serta beberapa data sekunder lainnya yang memiliki relevansi dan variabel yang dikaji.

4.3. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah berbagai bentuk indikator/unsur yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi. Variabel dalam penelitian sebagai berikut: (1) Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel bebas atau tidak terikat pada variabel lain. Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas.

5. METODE ANALISIS DATA

5.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi

t-1. Autokorelasi muncul, karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama yang lain.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi atas ketidaksamaan variance dan residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika pengamatan berbeda disebut heterokedastisitas.

5.3. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis berguna untuk menguji signifikan koefisien regresi yang di dapat. Artinya koefisien regresi yang didapat secara statistik tidak sama dengan nol, karena jika sama dengan nol dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terkaitnya.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Kondisi Geografis Kalimantan Tengah

Secara geografis, posisi Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara $0^{\circ}45'$ Lintang Utara, $3^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan 111° - 116° Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 153 km^2 secara administrasi terdiri atas 13 Kabupaten dan 1 Kota. Dari 13 Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Murung Raya merupakan yang terluas wilayahnya yaitu 23.700 km^2 atau 15,43%

dari luas provinsi, terluas kedua adalah Kabupaten Kotawaringan Barat dengan 16.796 km^2 atau 10,94% dari luas wilayah provinsi, terluas ketiga adalah Kabupaten Seruyan yang luas 16.404 km^2 atau 10,68% dari luas wilayah.

6.2. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah masih didominasi oleh empat sektor, yaitu sektor pertanian (22,84%); sektor industri pengolahan (16,15%); sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (11,64%); sektor pertambangan dan penggalian (10,77%). Keempat sektor ini mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Kalimantan Tengah .

6.3. PDRB Perkapita

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, belumlah menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan perkapita.

PDRB perkapita penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2005 atas dasar harga berlaku sebesar Rp.10.330.980,- dan pada tahun 2015 mencapai Rp.40.139.000,- selama sepuluh tahun terjadi pertumbuhan sebesar Rp. 29.808.020 atau rata-rata bertambah tiap tahun sebesar Rp.2.980.802,- selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan PDRB perkapita rata-rata 28,85% pertahun.

6.4. Belanja Modal

Realisasi belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1995 ke tahun 1996 mengalami peningkatan dengan jumlah modal tahun 1995 sebesar Rp. 98.750.350,- dan pada tahun 1996 sebesar Rp. 96.577.100,- Pada tahun 2012 sampai tahun 2013 belanja modal kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 635.814.262,- dan Rp. 940.602.626,- dan turun kembali pada tahun 2014 sebesar Rp. 814.507.824,-

6.5. Hasil Analisis dan Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah di pengaruhi pengeluaran pemerintah berupa belanja modal, investasi penanaman modal dalam negeri, investasi penanaman modal asing, dan realisasi nilai ekspor.

6.6. Hasil Regresi

Analisis Regresi adalah salah satu yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan sistematis antara variabel dependen dengan variabel independen, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi dapat diuraikan dari hasil analisis estimasi regresi linear dalam bentuk Semi Logaritma Natural (Ln).

7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut: (1) Belanja modal

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, (2) Penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, (3) Penanaman modal asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, (4) Ekspor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun saran bagi penelitian ini sebagai berikut: (1) Agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan belanja modal daerah secara selektif yang lebih terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi yang dapat meningkatkan PDRB dan nilai tambah sehingga mampu memberikan pengaruh positif; (2) Agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menciptakan iklim investasi yang kondusif, proses perijinan yang sederhana, menyediakan sumberdaya manusia yang terampil guna mendorong investor untuk berinvestasi; (3) Agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperbaiki infrastruktur, penyederhanaan proses ijin ekspor, mencari pasar baru diluar negeri guna mendorong dan memperlancar kegiatan ekspor; (4) Pemerintah harus

menyediakan badan usaha yang bisa meningkatkan nilai ekonomis produksi daerah, karena selama ini di Provinsi Kalimantan Tengah masih banyak mengekspor *raw material* yang mana harganya jauh lebih rendah dengan produk olahan; dan (5) Pemerintah harus bisa membuat regulasi terhadap penanaman modal, agar penyerapan dan pemanfaatan sumberdaya manusia yang ada didaerah beserta sumberdaya alamnya bisa dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexiou Constantinous. 2009. Government Spending and Economic Growth. Economic Evidence From the South Eastern Europe (SSE). *Journal of Economic and Social Research*.
- Almasdi Syahza. 2000. Dampak Pengembangan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap ekonomi Daerah Riau. *Jurnal Penelitian*. Edisi IX. No.1 Hal 1-7. Lembaga Universitas Riau. Pekanbaru.
- Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset
- Badan Pusat Statistika. Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2005. Palangka Raya.
- Bambang Badan Pusat Statistika. Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2010. Palangka raya.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta. Penerbit BPF.
- Dominick, Salvatore. 1997. *Ekonomi Internasional*. Alih bahasa oleh Haris Munandar edisi 5 cetak 1. Jakarta. Erlangga.
- Elizabeth C. Hirschman. 1992. The Consciousness of Adidiction: Toward a General Theory of Compulsive Consumption. *The journal of consumer reasearch*. Vol.19, No.2
- Halim, Abdul. 2004. *Akutansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat.
- Irham dan Yogi. 2003. *Ekspor di Indonesia*. Pustaka Binaman, cetak pertama. Jakarta. Pressindo.
- Rosenstein-Rodan. Critea for Evaluation of National Development Effrot. *Journal Development Planning*. Vol 1, no. 1
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Todaro M.P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga. Edisi Kedelapan.
- Woo S. Jung and Peyton J.Marshall. 1985. Exports, growth and causality in developing countries. *Journal of Development Economic*. Vol. 18, issue 1, 1-12.